

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Hal yang paling mendasar yang dimiliki suatu negara kesatuan adalah otonomi daerah atau pelimpahan wewenang. Walaupun menjadi hal yang mendasar di negara kesatuan, otonomi daerah memiliki suatu batasan tertentu dan juga terikat yang tidak boleh membahayakan keutuhan suatu negara kesatuan itu sendiri. Pengaturan terkait bentuk otonomi daerah telah diatur didalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Kepala daerah memiliki suatu kebebasan tersendiri untuk mengatur dan mengurus hal-hal yang berkaitan dengan daerahnya serta memahami batasan wewenang yang telah diatur. Dengan pertimbangan bahwa tujuan pelimpahan wewenang yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk dapat menghadirkan kesejahteraan, keadilan dan kemakmuran bagi masyarakatnya.

Dasar dari otonomi daerah adalah usaha pemberdayaan daerah yang didalamnya secara lebih luas terdapat pengambilan keputusan daerah yang memiliki tanggung jawab untuk dapat mengelola sumber daya yang dimiliki sesuai dengan kebutuhan, prioritas serta potensi daerah itu sendiri. Aspek perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi merupakan kewenangan yang luas dan utuh dimiliki oleh pemerintahan daerah yang nanti diakhir harus dipertanggung jawabkan kepada pemerintah pusat dan masyarakat. Penyelenggaraan otonomi daerah selalu berlandaskan prinsip luas, nyata dan bertanggung jawab dan wajib meninjau pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan aspirasi yang muncul didalam masyarakat.

Tidak semua kekuasaan diatur secara penuh oleh pemerintah pusat. Akan tetapi sesuai dengan perumusan dalam sistem desentralisasi, kekuasaan tersebut didistribusikan sebagian kepada pemerintah daerah. Hal tersebut yang membuat daerah dapat dengan mandiri mengatur urusan rumah tangganya sendiri sesuai dengan kondisi daerah masing-masing. Masyarakat daerah dianggap mampu memahami akan kebutuhan daerahnya yang dapat menunjang perkembangan daerah berdasarkan potensi serta pemikiran local menuju pembangunan berskala nasional.

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki berbagai pulau, ras dan suku, serta keanekaragaman lainnya. Sebagai negara kesatuan yang memiliki beberapa pulau besar berpenghuni membuat permasalahan muncul seperti kurangnya pemerataan pembangunan di daerah serta penanganan terkait konflik local. Adanya suatu proses pelimpahan wewenang kepada daerah diharapkan mampu untuk mengatur permasalahan yang muncul di daerah. Akan tetapi kenyataannya pelimpahan wewenang sering kali disalahgunakan oleh daerah. Hal ini dibuktikan bahwa sejak penerapan otonomi daerah, sekitar 70 persen dari total kepala dan wakil kepala daerah terjerat kasus korupsi (Santoso, 2014).

Kurangnya keikutsertaan masyarakat dalam pengambilan keputusan membuat sering terjadinya penyelewengan wewenang, khususnya masih kurang jelasnya aturan yang mengatur peran serta fungsi dari pemerintah desa membuat kurang optimal dalam mengatur hal-hal yang berkaitan dengan rumah tangganya sendiri. Hal tersebut membuat lahirnya undang-undang baru yaitu Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang khusus untuk mengatur terkait penyelenggaraan pemerintah desa. Munculnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dianggap merupakan satu langkah

maju dalam pembangunan Desa. Undang-undang tersebut membuat Desa menjadi perhatian khusus pemerintah pusat agar Desa sebagai sebuah institusi paling dekat dengan masyarakat dapat menjadi maju berkembang sebagai landasan yang kuat menuju masyarakat yang sejahtera.

Definisi Desa dalam UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa:

“Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Desa yang merupakan kesatuan dari masyarakat hukum memiliki hak untuk melakukan perbuatan hukum baik itu hukum public maupun hukum perdata, memiliki kekayaan serta dapat menuntut dan dituntut ke pengadilan. Hal ini untuk menunjang kelangsungan organisasi desa membuat konsep dari otonomi desa harus mempersiapkan berbagai pihak, mulai dari sumber daya manusia dan juga infrastruktur desa. Struktur pemerintahan menetapkan Desa sebagai organisasi terbawah, terkecil dan juga terdekat dengan masyarakat. Organisasi terbawah disini dalam artian Desa adalah organisasi pemerintahan yang paling berhubungan langsung secara ekonomi, social maupun budaya dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Organisasi terkecil dalam artian Desa memiliki wilayah dan juga tugas-tugas pemerintahan yang tidak sebesar organisasi di atasnya yaitu Kabupaten. Kemudian Desa dianggap sebagai organisasi pemerintah paling dekat dengan masyarakat karena kenyataannya baik secara geografis, Desa lebih mudah diakses

daripada organisasi di atasnya yang membuat masyarakat berhubungan langsung dengan pemerintah desa terkait dengan pelayanan, pembangunan serta pemberdayaan masyarakat.

Adanya undang-undang terbaru tentang Desa, membuat Desa memiliki kewenangan yang luas serta menjadi sebuah tempat untuk dapat menyampaikan kepentingannya bagi masyarakat. Pembangunan social menjadi hal wajib untuk dilaksanakan oleh Desa sehingga secara jelas Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota menyerahkan pelaksanaan pembangunan untuk diurus secara mandiri oleh Desa. Oleh karena itu dalam rangka mewujudkan Desa yang maju, Pemerintah Desa berhak untuk merencanakan pembangunan Desa. System perencanaan pembangunan Desa merupakan satu kesatuan dengan system perencanaan daerah Kabupaten atau Kota. Perencanaan pembangunan Desa yang disusun oleh Pemerintah Daerah yang mengikutsertakan partisipasi seluruh masyarakat di Desa. Salah satu fakta yang menunjukkan bahwa pembangunan pada saat ini lebih banyak berfokus di daerah pedesaan karena sebagian besar masyarakat Indonesia masih bertempat tinggal di daerah Desa.

Salah satu langkah maju dalam pembangunan Desa adalah terjadinya suatu bentuk kolaborasi antara Pemerintah Desa dan masyarakat demi terwujudnya suatu kesejahteraan. Pemerintah Desa maupun masyarakat merupakan dua sisi yang harus terlibat dalam pembangunan Desa. Jadi untuk mewujudkan suatu pembangunan Desa, kedua sisi tersebut harus saling bekerja sama satu sama lain. Secara singkat, pembangunan Desa atau rural development meningkatkan dua aspek, yaitu aspek pembangunan masyarakat dan aspek pembangunan lingkungan hidup masyarakat. Tujuan dari pembangunan Desa bukan hanya terfokus pada peningkatan lingkungan hidup

masyarakat. Akan tetapi peningkatan kualitas hidup yang dibentuk dalam aspek pemberdayaan masyarakat Desa.

Pembangunan Desa dianggap sebagai bagian dari pembangunan nasional, karena pembangunan Desa adalah salah satu bagian terpenting dalam pembangunan nasional yang sukses. Apabila pembangunan Desa berhasil dilakukan maka akan memberikan efek positif bagi pembangunan nasional secara menyeluruh. Penyelenggaraan pembangunan Desa di era otonomi daerah sering melibatkan partisipasi dari masyarakat. Hal tersebut yang menuntut didalam penyelenggaraan pembangunan dibutuhkan seorang pemimpin. Pemimpin yang diharapkan mampu untuk mendorong partisipasi masyarakat Desa. Pembangunan desa bahkan diatur dalam Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa. Dijelaskan bahwa pembangunan desa merupakan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di desa.

Pemerintahan Desa dipimpin oleh Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan tertinggi tingkat Desa yang dibantu perangkatnya. Kepala desa sebagai penanggung jawab didalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang sebagaimana hal tersebut diatur dalam pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 ditegaskan bahwa Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Kemudian pada pasal 26 ayat (2) disebutkan tugas dan wewenang Kepala Desa sebagai berikut: Kepala Desa sebagai pemimpin dalam penyelenggaraan pemerintahan desa juga yang menetapkan peraturan desa, mempunyai kewenangan dalam mengangkat serta memberhentikan perangkat desa, pemegang kekuasaan dalam pengelolaan keuangan dan

asset desa, menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes), membina dan membangun kehidupan, ketentraman dan ketertiban masyarakat desa.

Dalam konteks klasik dijelaskan bahwa didalam suatu organisasi ada yang namanya memimpin dan dipimpin. Salah satu hal menarik yang masih sering untuk diperbincangkan dewasa ini adalah terkait kepemimpinan. Keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi merupakan salah satu factor yang dapat menilai kualitas suatu kepemimpinan seseorang. Kepemimpinan tumbuh secara alami diantara sekelompok orang yang ada pada suatu organisasi. Dari sekelompok orang tersebut, ada yang memimpin sedangkan yang lain akan mengikuti. Dalam manajemen disebutkan bahwa pemimpin adalah inti dari segala aktivitas/kegiatan.

Menurut (Masruhin, 2015), kepala desa yang memiliki sifat peranan kesosialisasian dikategorikan sebagai contoh kepemimpinan yang peduli terhadap pembangunan di suatu desa. Kepala Desa sebagai seorang pemimpin, dinilai memiliki aspek-aspek kepribadian yang identik sehingga dapat menunjang usahanya didalam mewujudkan suatu hubungan yang baik dengan masyarakat. “Gaya kepemimpinan merupakan norma perilaku yang digunakan oleh seseorang pada saat mencoba mempengaruhi perilaku orang lain” (Thoha, 2009)

Mendefinisikan seorang pemimpin yang berhasil dalam menjalankan perannya, dilihat dari aspek apakah pemimpin tersebut mampu untuk menjadi seseorang yang menciptakan serta menggerakkan anggotanya dalam lingkup kerja dengan mendorong dan mengembangkan pertumbuhan kinerja anggota dalam mencapai suatu tujuan yang ada (Fathoni, 2015). Seorang pemimpin akan membawa suatu norma-norma baru yang

akan dijalankan secara penuh oleh bawahannya (Steenbergen, 2016). Ciri khas kepala desa dalam memimpin memiliki keterkaitan hubungan antara tujuan yang ingin dicapai dalam pemerintahan desa. Kegiatan memotivasi, membimbing serta mendorong anggotanya dalam mencapai suatu tujuan pemerintahan desa berkaitan dengan gaya kepemimpinan yang diterapkan kepala desa. Kepala desa selaku pemimpin yang menjalankan fungsi kepemimpinan dalam pemerintahan desa dituntut untuk dapat menjalankan tugasnya dengan baik dalam melayani kebutuhan masyarakat.

Era otonomi saat ini menekankan bahwa setiap penyelenggaraan pembangunan dari tingkat nasional maupun desa di seluruh Indonesia harus melibatkan partisipasi masyarakat didalamnya. Kemudian dalam menyelenggarakan aktivitas pembangunan dibutuhkan seorang pemimpin yang mampu untuk mendorong dan mengembangkan partisipasi masyarakat. Kinerja kepala desa sangat menentukan dalam peningkatan pembangunan desa berkaitan dengan berhasil atau tidaknya peningkatan tersebut. Kepala desa yang menjalankan fungsi kepemimpinan mulai dari perencanaan, penggerak, pemotivasi, mengarahkan, komunikasi, pengorganisasian serta pelaksanaan dianggap sebagai seorang manajer dalam menjalankan fungsi manajemen (Karauwan, 2013).

Gaya kepemimpinan merupakan factor eksternal yang dapat berpengaruh dalam kinerja anggota suatu organisasi. Dengan menerapkan gaya kepemimpinan yang dapat memahami siapa yang dipimpin, mengetahui kemampuan dan kelemahan anggota, dan memahami cara memanfaatkan kemampuan anggota agar dapat mengimbangi kelemahan yang dimiliki merupakan ciri dari pemimpin yang efektif (Ananto, 2014). Ananto (2014) menambahkan Apabila diterapkannya gaya kepemimpinan yang tidak sesuai dengan tugas dan karakteristik anggota membuat adanya penurunan rasa semangat dalam

menjalankan aktivitas kerja anggotanya atau bisa juga terjadi hilangnya semangat kerja yang berakibat anggota tidak focus dalam menjalankan pekerjaan.

Ada dua unsure utama dalam proses pembangunan desa yang saling berkaitan yaitu adanya partisipasi dari masyarakat dan pembinaan dari pemerintah. Singkatnya kedua unsure ini baik masyarakat maupun pemerintah saling terlibat langsung dalam proses pembangunan desa (Pangalila, 2015). Proses pembangunan yang mengikutsertakan partisipasi masyarakat membuat peran Kepala Desa sebagai pemimpin di Pemerintahan Desa semakin besar. Kepemimpinan kepala desa sangat ditentukan dengan bagaimana kepala desa menerapkan gaya kepemimpinan yang digunakan untuk mencapai tujuan.

Penerapan gaya kepemimpinan yang digunakan sangatlah berpengaruh dalam proses pembangunan, karena dalam proses pembangunan hal pertama yang dilakukan adalah perencanaan. Perencanaan yang dilakukan kepala desa dengan mengikutsertakan masyarakat dapat membuat pembangunan desa berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Agar program yang dibuat pemerintah efektif dilaksanakan, perlu adanya gaya kepemimpinan dari kepala desa dalam mengarahkan sekaligus mendorong masyarakat agar ikut berpartisipasi didalamnya dalam perencanaan pelaksanaan pembangunan desa.

Untuk mengkaji secara lebih luas mengenai studi gaya kepemimpinan kepala desa dalam pembangunan desa, peneliti melakukan studi di Desa Titiwangi. Desa titiwangi merupakan salah satu desa yang masuk kedalam Kecamatan Candipuro. Pada tahun 2013, dengan Kepala Desa yang baru secara perlahan-lahan mulai membangun desa untuk kesejahteraan masyarakat. Salah satu pembangunan yang dilakukan oleh Kepala Desa

titiwangi adalah adanya Program Desa Siaga. Program ini merupakan program yang terdiri dari siaga gotong royong, donor darah, kamtibmas dan membangun desa yang mulai berjalan sekitar tahun 2015. Program ini dibagi menjadi empat kategori yaitu dini, rutin, spontan, dan paten. Kategori dini meliputi gerakan seribu rupiah bagi seluruh siswa untuk membantu teman sekolahnya yang kurang mampu. Kategori rutin meliputi gotong royong. Kategori spontan meliputi gotong royong membantu membedah rumah warga yang kurang mampu. Kategori paten meliputi memanfaatkan tanah hibah untuk dikelola oleh masyarakat dan hasilnya untuk memakmurkan masjid.

Berawal dari diterapkannya Program Desa Siaga, mengantarkan Desa Titiwangi Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan meraih peringkat II dalam lomba Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) tingkat Nasional ke XIII tahun 2017. Selain itu Desa Titiwangi merupakan salah satu desa yang berhasil mengembangkan ekonomi kreatif masyarakat dengan membuat wc/kloset/jambanisasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan jumlah 1.222 wc menjadikan Desa Titiwangi menjadi desa di provinsi Lampung yang masyarakatnya memiliki tempat pembuangan akhir yang sehat. Desa Titiwangi juga memiliki Program Inovasi Desa (PID) yaitu Bank Darah Desa. Program yang telah berkerja sama dengan Palang Merah Indonesia (PMI) Lampung ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam mendapatkan transfuse darah bagi yang membutuhkan khususnya masyarakat desa titiwangi

Atas dasar kondisi itulah, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut, dengan judul: “Studi Gaya Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pembangunan Desa Tahun 2016-2017 (Studi Kasus di Desa Titiwangi, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lampung Selatan)”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Gaya Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pembangunan Desa Tahun 2016-2017 di Desa Titiwangi, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lampung Selatan?
2. Bagaimana Relevansi Gaya Kepemimpinan Kepala Desa Dengan Proses Pembangunan Desa Tahun 2016-2017 di Desa Titiwangi, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lampung Selatan?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui Gaya Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pembangunan Desa Tahun 2016-2017 di Desa Titiwangi, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lampung Selatan.
2. Untuk mengetahui Relevansi Gaya Kepemimpinan Kepala Desa Dengan Proses Pembangunan Desa Tahun 2016-2017 di Desa Titiwangi, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lampung Selatan

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

- Hasil penelitian ini diharapkan memberikan serta memperkaya ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan ilmu pemerintahan khususnya terkait tentang gaya kepemimpinan dan pembangunan desa.

### **1.4.2 Manfaat Praktis**

- Manfaat bagi masyarakat adalah masyarakat mampu untuk mengetahui gaya kepemimpinan Kepala Desa dan dapat menyesuaikannya agar terciptanya kolaborasi dalam pembangunan desa.
- Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam mengetahui Gaya Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pembangunan Desa di Desa Titiwangi, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lampung Selatan.

## **1.5 Tinjauan Pustaka**

Penelitian mengenai gaya kepemimpinan kepala desa dalam pembangunan desa ini banyak mengembangkan dari penelitian-penelitian sebelumnya. Adapun hasil penelusuran dari penelitian sebelumnya adalah sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Susanti pada tahun (2017) dalam bentuk skripsi di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung dengan judul: Pengaruh Gaya Kepemimpinan Kepala Pekon Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai di Pekon Sindang Pagar Kecamatan Sumber Jaya Kabupaten Lampung Barat. Dari penelitian diatas

menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan kepala pekon memiliki pengaruh yang signifikan dalam meningkatkan kinerja pegawai. Semakin efektif gaya kepemimpinan kepala pekon yang demokrasi maka akan semakin meningkatkan kinerja pegawai dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Muryusna pada tahun (2013) dalam bentuk tesis di Universitas Terbuka Jakarta dengan judul: Peranan Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pengelolaan Program Pemberdayaan Desa Menuju Desa Mandiri di Desa Pekan Kamis Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir. Dari penelitian diatas dapat dikatakan bahwa berhasil atau tidaknya program pemberdayaan desa tersebut tidak terlepas dari peranan kepala desa sebagai coordinator pembangunan.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Dribby K. A Pangkey pada tahun (2015) dalam bentuk skripsi di Universitas Sam Ratulangi (UNSRAT) Sulawesi Utara dengan judul: Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Tateli Satu Kecamatan Mandolang Kabupaten Minahasa. Dari penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa peran kepala desa dalam pembangunan di desa tersebut terlihat dari adanya upaya pengawalan yang intensif dari pihak pemerintahan desa dalam pembangunan secara fisik di Desa Tateli.
4. Penelitian yang dilakukan oleh Multazam Fadli Masruhin pada tahun (2015) dalam bentuk skripsi di Universitas Jember dengan judul: Gaya Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pembangunan di Desa Maron Kulon, Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo. Dari penelitian diatas menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan kepala desa mempengaruhi dalam penyelenggaraan pembangunan. Kepala Desa maron menggunakan gaya kepemimpinan demokrasi yang membuat setiap adanya pengambilan

keputusan dalam penyelenggaraan pembangunan selalu mengadakan rapat koordinasi dengan pihak-pihak terkait.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Holilah pada tahun (2014) dalam bentuk jurnal review politik di Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya dengan judul: Fungsi Dan Gaya Kepemimpinan Kepala Desa Perempuan Di Desa Masaran Banyuwates Sampang. Dari penelitian diatas disimpulkan bahwa fungsi kepemimpinan kepala desa perempuan di desa tersebut tidak sesuai dengan apa yang seharusnya. Gaya kepemimpinan yang dilakukan oleh kepala desa tersebut dikategorikan sebagai *laissez faire* karena bawahan diberikan kebebasan dalam bertindak tanpa perlu diperintahkan sebelumnya.
6. Penelitian yang dilakukan Dirk J. Steenberg pada tahun (2016) dalam bentuk jurnal di Charles Darwin University Australia dengan judul: Strategic Customary Village Leadership in the Context of Marine Conservation and Development in Southeast Maluku, Indonesia. Dari penelitian diatas disimpulkan kepemimpinan local mempengaruhi pelaksanaan program karena dari kepemimpinan local bisa membuat masyarakat percaya bahwa maksud dan tujuan dari pelaksanaan program tersebut bermanfaat bagi masyarakat.

Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, penelitian ini lebih memfokuskan pada gaya kepemimpinan kepala desa dalam pembangunan desa tahun 2016-2017 di Desa Titiwangi Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan

## **1.6 Kerangka Dasar Teori**

### **1.6.1 Gaya Kepemimpinan**

#### **1.6.1.1 Kepemimpinan**

Menurut Sanba dalam (Usat, 2013) ada 3 hal yang perlu dijelaskan yaitu: (1) Bagaimana awal dari sejarah dan proses terbentuknya sebuah kepemimpinan tradisional di sistem pemerintahan desa. (2) bagaimana tuntutan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 dengan konflik kepemimpinan tradisional sehingga kepemimpinan tersebut dapat bertahan. (3) Serta seberapa efektif kepemimpinan tradisional yang diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979.

Kepemimpinan secara etimologis diartikan sebagai berikut:

1. Dalam bahasa Inggris, kepemimpinan disebut *leadership*. *Leadership* berasal dari kata kerja *to lead* yang artinya memimpin
2. Kepemimpinan juga bisa diartikan sebagai *to show the way to by going in advance*
3. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa memimpin merupakan suatu kegiatan seseorang untuk mengarahkan orang lain (Sulistiyani, 2008).

Terry dalam (Runtu, 2013) mengemukakan bahwa kepemimpinan adalah suatu kegiatan untuk mempengaruhi seseorang agar seseorang tersebut dapat bekerja secara ikhlas agar mencapai tujuan bersama. Sedangkan Wexley & Yukl dalam (Runtu, 2013) menjelaskan kepemimpinan diartikan sebagai kegiatan mempengaruhi orang lain agar orang tersebut mengeluarkan tenaganya untuk menyelesaikan tugas yang diberikan. Pendapat yang hampir serupa terkait kepemimpinan juga dikemukakan oleh H.Koontz dan O'Donnell dalam (Runtu, 2013) yaitu sebuah seni untuk mempengaruhi sekelompok orang agar orang tersebut mau untuk mengerahkan tenaga agar tercapai tujuan kelompok.

Rachmawati dalam (Runtu, 2013) mendefinisikan kepemimpinan adalah kemampuan mempengaruhi suatu kelompok agar mencapai tujuan yang ingin dicapai tanpa memaksa kehendak individu. Pendapat lain yang dikemukakan oleh Kartini dalam (Todo, 2014) mengemukakan bahwa kepemimpinan diibartkan sebagai kekuatan yang dimiliki seseorang, kekuatan tersebut berupa hal yang kreatif yang mampu mempengaruhi di kelompok sehingga pemikiran antara kelompok dengan seseorang tersebut menjadi satu keinginan dan searah sesuai dengan apa yang diinginkan. Menurut Rivai dalam (Lawasa, 2017), kepemimpinan adalah kemampuan memperoleh kesepakatan dan keterkaitan dalam sasaran bersama syarat-syarat organisasi yang dicapai dengan pengalaman dan kepuasan di kelompok.

Kepemimpinan menurut Numbberi dalam (Todo, 2014) juga bisa disebut sebagai kepribadian dan kemampuan seseorang dalam mempengaruhi orang lain agar orang tersebut mau untuk melakukan apa yang diperintahkan untuk mencapai tujuan bersama yang didalamnya ada proses komunikasi diantara keduanya agar terjadi sebuah proses yang berjalan sesuai dengan tujuan yang dicapai. Sedangkan menurut Effendi dalam (Todo, 2014), kepemimpinan adalah suatu proses membimbing dan mengotrol tingkah laku orang lain. Menurut Stogdill dalam (Hasanah, 2015) sebagai sebuah konsep manajemen, kepemimpinan dapat diartikan berbagai macam tergantung bagaimana titik pemikirannya.

Menurut Siagian dalam (Ananto, 2014) kepemimpinan merupakan kemampuan seseorang untuk dapat mempengaruhi bawahan, sehingga bawahan mau melakukan sesuatu sesuai dengan kehendak pemimpin meskipun hal tersebut tidak disenangi. Hasibuan dalam (Ananto, 2014) mendefinisikan kepemimpinan merupakan cara

seseorang yang digunakan untuk bekerja sama dengan orang lain secara produktif agar dapat mencapai tujuan tertentu dengan mempengaruhi perilaku orang tersebut.

Menurut Tead dalam (Syafiie, 2014), kepemimpinan diartikan sebagai perpaduan dari perangai yang memungkinkan seseorang mampu mendorong pihak lain menyelesaikan tugasnya. Kepemimpinan juga bisa didefinisikan sebagai cara yang terorganisir dalam mengelola serta memanfaatkan sumber daya yang ada guna mencapai tujuan, baik manusia ataupun materiil (Sutrisno dalam Ananto, 2014).

Menurut (Thoha M. , 2009), dua hal yang dilakukan pemimpin terhadap anggotanya yaitu perilaku mengarahkan dan perilaku mendukung. Dalam perilaku mengarahkan diartikan sebagai sejauh mana seorang pemimpin melibatkan diri komunikasi dalam satu arah. Sedangkan perilaku mendukung diartikan sebagai sejauh mana seorang pemimpin melibatkan diri pada komunikasi dalam dua arah. Dua komponen perilaku tersebut yang ditempatkan pada poros yang berbeda dan menghasilkan empat gaya dasar kepemimpinan.

Gambar 1.1 Empat Gaya Kepemimpinan Dasar



Sumber: Thoha: 2009

Menurut (Sutikno, 2014), kepemimpinan dibagi menjadi lima fungsi pokok yaitu:

- 1) Fungsi Instruktif. Peran pemimpin dalam fungsi instruktif adalah sebagai komunikator yang memberikan perintah kepada bawahan agar terjadi kepemimpinan yang efektif. Tugas bawahan hanya melaksanakan perintah. Oleh karena itu, fungsi instruktif bisa disebut fungsi yang bersifat komunikasi satu arah.
- 2) Fungsi Konsultatif. Pemimpin yang menjalankan fungsi ini dalam mengambil keputusan sering kali meminta kritik dan saran kepada bawahan yang dipimpinya agar penetapan keputusan berjalan dengan efektif dan efisien. Fungsi konsultatif bisa disebut fungsi yang menjalankan komunikasi dua arah.
- 3) Fungsi Partisipasi. Pemimpin berusaha untuk mengikutsertakan secara aktif bawahannya dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan.
- 4) Fungsi Delegasi. Pemimpin memberikan delegasi atau pelimpahan wewenang kepada bawahannya karena perkembangan serta kemajuan organisasi tidak bisa dijalankan sendiri oleh pemimpin.
- 5) Fungsi Pengendalian. Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, pemimpin harus mampu mengatur dan mengarahkan dengan baik bawahannya agar bisa efektif. Fungsi pengendalian bisa dilakukan dengan koordinasi, bimbingan dan pengawasan.

Jadi berdasarkan uraian diatas, peneliti menyimpulkan bahwa kepemimpinan adalah suatu kemampuan bagi seseorang yang mampu membuat orang lain disekitarnya melakukan apa yang diperintahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Kepemimpinan merupakan suatu hal yang diperlukan dalam setiap

kehidupan, karena dalam kenyataannya demi kelangsungan hidup bangsa di negara memerlukan pemimpin untuk menuntun kearah yang lebih baik.

### **1.6.1.2 Gaya Kepemimpinan**

Menurut Robert dalam (Ananto, 2014), gaya kepemimpinan merupakan cara seorang pemimpin dalam melaksanakan fungsi kepemimpinan dan menjadi aspek yang dilihat oleh orang-orang yang dipimpinnnya atau orang lain yang mengamati dari luar. Prasetyo dalam (Wardhana, 2014), gaya kepemimpinan adalah bentuk perilaku yang dapat dibuat digunakan untuk mensatukan tujuan individu dengan tujuan kelompok. Menurut Thoha dalam (Wardhana, 2014), gaya kepemimpinan adalah norma perilaku yang digunakan seseorang saat mempengaruhi perilaku orang lain seperti yang dilihat. Menurut (Syafiie, 2014), gaya kepemimpinan yang dikaji dalam islam yaitu gaya demokratis, gaya birokratis, gaya kebebasan dan gaya otokratis.

Menurut (Fathoni, 2015) ada beberapa tipe gaya kepemimpinan:

1. Menurut Iowa University:

- 1) Gaya Kepemimpinan Otokratis, 2) Gaya Kepemimpinan Demokratis, dan 3) Gaya Kepemimpinan *Laissez Faire*.

2. Menurut Ohio University

- 1) Gaya Kepemimpinan Konsiderasi (*Consideration*) dan 2) Gaya Kepemimpinan Inisiasi Struktur (*Initiating Structure*)

3. Menurut Michigan University

- 1) Gaya Kepemimpinan Kontinum Tannenbaum dan Schmidt, 2) Gaya Kepemimpinan Situasional Hersey dan Blanchard, 3) Gaya Kepemimpinan Jalan Tujuan House (*Path Goal Theory*), 4) Gaya Kepemimpinan Kontingensi

Fiedler, 5) Gaya Kepemimpinan yang berorientasi pada bawahan (*Employee Oriented*), dan 6) Gaya Kepemimpinan yang berorientasi pada tugas (*Job Oriented*).

Menurut Siagian dalam (Ananto, 2014), ada 5 tipe gaya kepemimpinan yang disesuaikan dengan situasi yaitu:

#### 1. Tipe pemimpin yang otokratik

Pemimpin yang bertipe otokratik adalah seorang pemimpin yang:

- 1) Organisasi dianggap sebagai milik pribadi
- 2) Tujuan organisasi disamakan dengan tujuan pribadi
- 3) Anggota dianggap sebagai alat
- 4) Anti terhadap kritik, saran dan pendapat
- 5) Kekuasaan formal sebagai pengatur segala hal
- 6) Sering mempergunakan unsur paksaan

#### 2. Tipe pemimpin yang militeristik

Pemimpin yang bertipe militeristik adalah seorang pemimpin yang:

- 1) Sistem perintah sebagai penggerak utama anggota
- 2) Pangkat dan jabatan sebagai aspek dalam memberi perintah
- 3) Formalitas diatas segalanya
- 4) Menerapkan disiplin tinggi dan kaku kepada anggota

#### 3. Tipe pemimpin yang paternalistic

Pemimpin yang bertipe paternalistic adalah seorang pemimpin yang:

- 1) Menganggap anggota tidak dewasa
- 2) Bersikap berlebih dalam melindungi

- 3) Anggota jarang diberi kesempatan menyampaikan pendapat
- 4) Anggota jarang diberi kesempatan mengeluarkan inisiatif
- 5) Anggota jarang diberi kesempatan untuk mengembangkan daya kreasi dan fantasi
- 6) Bersikap terlalu mau tau

#### 4. Tipe pemimpin yang kharismatik

Pemimpin kharismatik mampu memainkan peran penting dalam menciptakan perubahan dan mewujudkan atmosfer motivasi. Individu yang menyandang kualitas-kualitas pahlawan memiliki karisma. Sebagian yang lain memandang pemimpin karismatik adalah pahlawan.

#### 5. Tipe pemimpin yang demokratis

Pemimpin yang demokratis dianggap mampu untuk dapat menjalankan tugasnya dengan baik di suatu organisasi era modern saat ini karena:

- 1) Saran, pendapat serta kritik dari anggota sering dijadikan evaluasi bagi pemimpin
- 2) Kerjasama sebagai hal utama yang dilakukan dalam mencapai tujuan
- 3) Kesejahteraan sebagai tujuan utama
- 4) Memberikan penghargaan atau sanksi kepada anggota secara obyektif

Menurut (Syafiie, 2014), ada beberapa gaya kepemimpinan yang bisa dikaji dalam islam yaitu sebagai berikut:

##### 1) Gaya Demokratis

Merupakan cara yang digunakan oleh seorang pemimpin dalam pemerintahan untuk menguasai anggota serta masyarakat melalui metode pembagian tugas yang adil dan merata.

#### 2) Gaya Birokratis

Merupakan cara yang digunakan oleh seorang pemimpin dengan metode tanpa pandang bulu yang diartikan semua anggotanya diperlakukan secara sama secara disiplin, ketat pada aturan sehingga anggotanya menjadi kaku tapi sederhana.

#### 3) Gaya Kebebasan

Merupakan cara yang digunakan oleh seorang pemimpin dengan metode yang sering disebut *Laissez Faire* atau *liberalism* atau pemberian keleluasaan pada anggota seluas-luasnya.

#### 4) Gaya Otokratis

Merupakan cara yang digunakan oleh seorang pemimpin dengan metode paksaan kekuasaan yang dimiliki pemimpin.

Jadi gaya kepemimpinan disimpulkan oleh peneliti sebagai sebuah ciri khas yang dimiliki oleh seorang pemimpin dan ciri khas tersebut yang bisa menentukan motivasi bawahan dalam mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori gaya kepemimpinan demokratik menurut Siagian. Karena peneliti menilai bahwa gaya kepemimpinan demokratiklah yang paling sesuai dalam menjalankan tugasnya dengan baik dalam suatu organisasi.

## 1.6.2 Pembangunan Desa

Desa merupakan satuan pemerintahan terkecil yang ada di Indonesia yang harus mendapatkan pembinaan seperti satuan pemerintahan lainnya. Hal ini dikarenakan sebagian besar masyarakat di Negara Republik Indonesia ini masih bertempat tinggal di daerah pedesaan, yang membuat desa menjadi perhatian yang cukup khusus dari pemerintah. Dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan secara nasional maka diadakannya pembangunan. Pembangunan desa secara umum dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Pembangunan Fisik merupakan pembangunan sarana dan prasarana yang dapat dilihat seperti pembangunan jalan, jembatan, pasar, dan lain-lain.
2. Pembangunan Non Fisik adalah pembangunan dalam hal mental dan spritual seperti penyuluhan kesehatan, penyuluhan kelompok tani, dan lain sebagainya

Menurut Suryono dalam (Henryk, 2013), pembangunan adalah perubahan yang terjadi pada masyarakat, yang merubah pola-pola di masyarakat yang memungkinkan masyarakat tersebut mempunyai kekuasaan yang lebih terhadap lingkungan dan juga politik serta masyarakat mampu untuk mengontrol diri mereka sendiri. Pembangunan adalah suatu proses yang berkaitan lebih dari satu hal seperti struktur social, institusi nasional serta sikap dari masyarakat yang bertujuan mengejar kenaikan pertumbuhan ekonomi dengan melibatkan individu atau kelompok yang berkepentingan untuk saling bekerjasama (Nugraheni, 2017).

Keberhasilan pembangunan nasional bisa dilihat dari seberapa berhasilnya pembangunan yang ada ditingkat desa, jika pembangunan desa di Indonesia berhasil maka akan membuat pembangunan secara nasional ikut serta terlibat didalamnya.

Pembangunan desa adalah seluruh kegiatan pembangunan yang berlangsung di desa dan meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, serta dilaksanakan secara terpadu dengan mengembangkan swadaya gotong royong (Ardilah, 2014). Pembangunan desa adalah program yang dibuat untuk menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat pedesaan, baik kesejahteraan secara lahir maupun batin dengan meningkatkan taraf hidup dalam mewujudkan masyarakat desa yang sejahtera (Usat, 2013).

Menurut Ndraha dalam (Hasanah, 2015), pembangunan desa merupakan suatu kenyataan bahwa pada tahap awal pembangunan nasional suatu bangsa, pemerintah negara yang bersangkutanlah yang memrakasai pembangunan dan bukan masyarakat, karena yang disebut belakangan ini masih dalam kondisi lemah, miskin, bodoh, penyakitan dan terpencil, dan lain sebagainya.

Menurut CST Kansil dalam (Hasanah, 2015), pembangunan desa adalah:

“Pembangunan yang dilakukan di desa secara menyeluruh dan terpadu dengan imbalan kewajiban yang serasi antara pemerintah dan masyarakat dan pemerintah wajib memberikan bimbingan, pengarahan, bantuan dan fasilitas yang diperlukan, sedangkan masyarakat desa memberikan partisipasinya dalam bentuk swakarsa dan swadaya gotong royong masyarakat pada setiap pembangunan yang diinginkan.”

Pembangunan secara umum dapat dibedakan menjadi dua bentuk yaitu: pembangunan fisik dan pembangunan non fisik. Pembangunan fisik Pembangunan fisik merupakan pembangunan sarana dan prasarana, misalnya pembangunan jalan dan jembatan, pembangunan tempat ibadah, pembangunan pasar, pembangunan drainase, dan pembangunan fasulitas umum lainnya. Sedangkan pembangunan non fisik adalah Pembangunan non fisik merupakan pembangunan mental spiritual,

misalnya penyuluhan kesehatan, penyuluhan pertanian, dan lain sebagainya (Hasanah, 2015).

Selanjutnya, menurut Ndraha dalam (Usat, 2013), menyatakan bahwa pembangunan desa memiliki ciri khas yaitu: (1) masyarakat desa menjadi bagian dari masyarakat tradisional yang diubah menjadi masyarakat modern. (2) pembangunan desa merupakan pembangunan yang mengikutsertakan partisipasi masyarakat didalamnya. (3) pembangunan desa disesuaikan dengan kondisi ekonomi, social dan budaya dimana desa tersebut berada. (4) proses pembangunan desa merupakan proses dimana masyarakat dapat mengembangkan kemampuan yang dimiliki. (5) pembangunan masyarakat yang bertujuan untuk menyadarkan diri akan pentingnya pembangunan itu sendiri. (6) pembangunan masyarakat merupakan pembangunan swadaya yang akan berkembang. (7) membangun desa merupakan bagian dari membangun lingkungan yang sejahtera.

Jadi pembangunan desa disimpulkan oleh peneliti adalah suatu bentuk perubahan yang ada di Desa, baik berupa perubahan secara fisik maupun non fisik yang bertujuan mensejahterakan seluruh masyarakat Desa.

#### **1.6.2.1 Penyelenggaraan Pembangunan Desa**

Kepala Desa sebagai salah satu aparatur dalam pemerintahan desa memiliki berbagai macam tugas, salah satunya adalah dalam menyelenggarakan pembangunan desa. Kepala desa beserta aparatur desa harus bisa berkoordinasi dengan masyarakat akan masyarakat tersebut dapat aktif dalam penyelenggaraan desa. Untuk dapat memaksimalkan pembangunan desa, kepala desa dapat melakukan berbagai cara

seperti memotivasi serta menggerakkan anggota masyarakat secara aktif agar mengerti pentingnya pembangunan desa.

Perencanaan adalah proses yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan dalam mencapai tujuan. Perencanaan pembangunan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis, terprogram dan berkesinambungan mulai dari tahap identifikasi kebutuhan masyarakat sampai tahap penetapan program pembangunan yang bertujuan untuk mencapai kondisi yang lebih baik dari situasi sebelumnya (Setiawan, 2013). Proses pembangunan yang ada di Desa sama dengan yang ada di Kabupaten. Proses pembangunan tersebut meliputi beberapa tahapan yaitu Perencanaan, Pelaksanaan, Pengawasan dan Evaluasi

Kepala desa bertugas sebagai seorang figur penggerak dan sebagai seseorang yang memiliki kekuasaan tertinggi di desa harus bisa memotivasi masyarakat dalam pembangunan desa. Tujuan penyelenggaraan pembangunan desa ini adalah mendukung koordinasi antara pelaku pembangunan, menjamin terciptanya integritas, sinkronisasi dan sinergi wilayah antar ruang dan waktu, fungsi pemerintah maupun antar desa dengan pemerintah di atasnya, menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, mengoptimalkan partisipasi masyarakat, menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien dan berkelanjutan, dan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) (Hasanah, 2015).

## **1.7 Definisi Konseptual**

Kepemimpinan adalah suatu kemampuan bagi seseorang yang mampu membuat orang lain disekitarnya melakukan apa yang diperintahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Sedangkan gaya kepemimpinan demokratis adalah seorang pemimpin yang bersedia menerima pendapat, saran serta kritik dari masyarakat sekaligus memperhatikan manusia sebagai factor terpenting dalam setiap aktivitas yang didasarkan pada partisipasi aktif dari masyarakat. Kemudian pembangunan desa adalah suatu bentuk perubahan yang ada di Desa, baik berupa perubahan secara fisik maupun non fisik yang bertujuan mensejahterakan seluruh masyarakat Desa.

## **1.8 Definisi Operasional**

### **A. Gaya Kepemimpinan Demokratis yaitu:**

- 1) Pemimpin yang dapat menerima saran, pendapat serta kritik dari anggotanya yang kemudian dijadikan evaluasi bagi pemimpin
- 2) Pemimpin yang selalu mengutamakan kerja sama dalam mencapai tujuan
- 3) Pemimpin yang memiliki tujuan utama yaitu kesejahteraan
- 4) Pemimpin yang dapat memberikan penghargaan atau sanksi kepada anggota secara obyektif

### **B. Relevansi Gaya Kepemimpinan dengan Proses Pembangunan desa yaitu:**

- 1) Penyelenggaraan Pembangunan Desa:
  - a. Adanya koordinasi antara para pelaku pembangunan.
  - b. Terciptanya integrasi, sinkronisasi dan strategi antara fungsi pemerintahan di desa dengan masyarakat.

- c. Adanya keterkatikan serta konsistensi dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.
- d. Mengoptimalkan partisipasi dari masyarakat.
- e. Menjamin terciptanya sumber daya yang ada secara efektif, efisien, adil serta berkelanjutan.

## 2) Output Pembangunan Desa

### 1. Pembangunan fisik:

- a. Pembangunan infrastruktur di desa seperti jalan raya, jembatan, gedung serta pasar desa

### 2. Pembangunan non fisik:

- a. Pembangunan dibidang kesehatan
- b. Pembangunan dibidang pendidikan
- c. Pembangunan dibidang ekonomi

## **1.9 Metode Penelitian**

### **1.9.1 Jenis Penelitian**

Peneliti menggunakan paradigma penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif dan pendekatan studi kasus. Penelitian kualitatif menurut (Moleong, 2012) adalah Penelitian yang melihat sekaligus memahami akan fenomena terkait yang dialami subjek penelitian dengan mendeskripsikan kedalam bentuk kalimat dan bahasa yang memanfaatkan berbagai metode alamiah yang ada. Jenis penelitian kualitatif deskriptif ini untuk mendeskripsikan temuan-temuan menarik terkait gaya kepemimpinan kepala desa dalam pembangunan desa di Desa Titiwangi

Selanjutnya terkait pendekatan studi kasus. Menurut Faisal dalam (Masruhin, 2015), studi kasus merupakan tipe pendekatan yang dilakukan secara interaktif, mendalam, serta komperhensif dalam memahami satu kasus yang diteliti. Dengan demikian, secara garis besar penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus merupakan penelitian yang menjelaskan suatu fakta yang ada pada obyek maupun keadaan sebenarnya dengan memunculkannya dalam bentuk tulisan yang sistematis.

### **1.9.2 Fokus Penelitian**

Focus penelitian merupakan hal yang penting dalam sebuah penelitian, karena berguna untuk membatasi masalah dan menetapkan focus penelitian kepada pokok masalah yang diteliti. Focus penelitian ini adalah berdasarkan tujuan penelitian yaitu untuk menjawab pertanyaan bagaimana gaya kepemimpinan kepala desa dalam pembangunan desa dan bagaimana relevansi gaya kepemimpinan kepala desa dalam pembangunan desa tahun 2016-2017 di Desa Titiwangi Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan.

### **1.9.3 Lokasi Penelitian**

Menurut (Moleong, 2012) dalam menentukan lokasi penelitian harus mempertimbangkan teori, substantif dan menelaah lapangan untuk mencari kenyataan yang ada serta mempertimbangkan factor geografis dan praktis. Lokasi penelitian ini adalah Desa Titiwangi Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan. Pertimbangan pemilihan lokasi karena peneliti ingin mengetahui gaya kepemimpinan kepala desa dalam pembangunan desa tahun 2016-2017.

#### 1.9.4 Teknik Pengumpulan dan Sumber Data

Jenis data penelitian ini berasal dari data primer dan sekunder, yaitu:

1. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber penelitian. Metode yang digunakan dalam mengumpulkan data primer yaitu:

- a. Wawancara

Pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan pertanyaan secara langsung kepada sejumlah orang yang mengetahui tentang gaya kepemimpinan Kepala Desa Titiwangi dalam pembangunan desa yaitu:

- 1) Sekretaris Desa
- 2) Kepala Urusan TU Usaha dan Umum
- 3) Kepala Urusan Keuangan
- 4) Kepala Urusan Perencanaan
- 5) Kepala Seksi Pemerintahan
- 6) Kepala Seksi Pelayanan
- 7) Kepala Seksi Kesejahteraan
- 8) Ketua BPD
- 9) Pengurus LPM
- 10) Kepala Dusun I
- 11) Kepala Dusun II
- 12) Kepala Dusun III
- 13) Kepala Dusun IV
- 14) Tokoh Agama dan Tokoh Pemerintah serta beberapa warga Titiwangi sebagai perwakilan

b. Observasi

Pengumpulan data yang dilakukan dengan mengamati secara langsung obyek penelitian yang berkaitan dengan gaya kepemimpinan dalam pembangunan desa tahun 2016-2017. Pengamatan yang dilakukan saat kepala desa melakukan kegiatan dalam menjalankan tugas dan kewajiban sebagai pemimpin Desa Titiwangi.

2. Data sekunder adalah data tambahan yang diperoleh dari sumber yang terkait dengan penelitian, seperti buku, jurnal dan literatur lain. Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan melihat sumber-sumber data lain yang berkaitan dengan permasalahan pokok yang diteliti. Adapun dokumen-dokumen yang diperoleh dari penelitian ini adalah:

- a. Profil Desa Titiwangi
- b. Daftar hadir rapat atau musyawarah desa

### **1.9.6 Teknik Analisa Data**

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini sama seperti yang disebutkan oleh milles dan huberman dalam (Salim, 2006) yaitu dalam penelitian kualitatif, metode yang digunakan untuk menganalisa data adalah metode analisa interaktif yang dimulai dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.